

BAB I

PENDAHULUAN

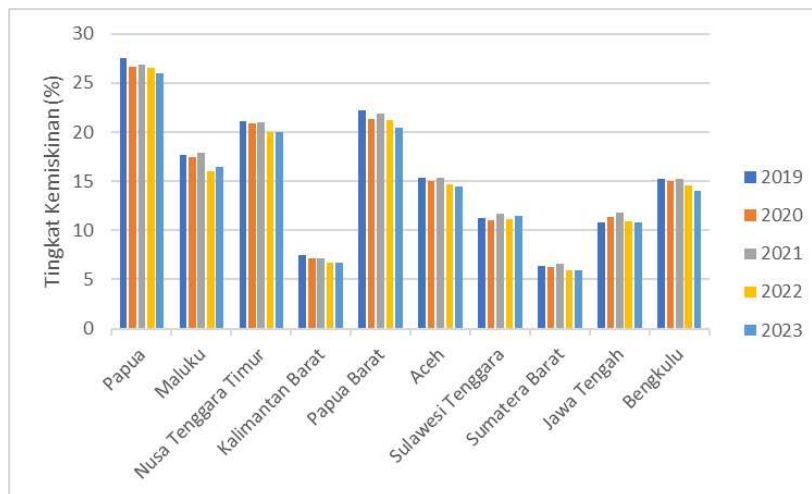
1.1 Latar Belakang

Setiap negara dihadapkan suatu permasalahan ekonomi, masalah yang nyata dihadapi beberapa negara adalah kemiskinan (Nabibah & Hanifa, 2022). Masalah mengenai kemiskinan (*poverty*) menjadi salah satu fokus yang harus diatasi di setiap negara. Seperti halnya negara yang sedang berkembang lainnya, Indonesia masih terus berupaya berproses untuk mengembangkan proses pembangunan perekonomian yang lebih baik dengan tujuan menjadikan Indonesia menjadi negara yang maju. Namun dalam realitanya, proses dalam membangun perekonomian tersebut tidak terlepas dari berbagai masalah yang menghambatnya.

Masalah kemiskinan masih menjadi isu struktural dalam pembangunan ekonomi dan sosial (Rahmawati et al., 2015). Kemiskinan mencerminkan kondisi keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Kebutuhan dasar tersebut mencakup pemenuhan sandang, pangan, layanan kesehatan, pendidikan, serta akses terhadap sarana pendukung kehidupan lainnya (Suryadarma et al., 2007). Kondisi kemiskinan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga berimplikasi luas terhadap kualitas hidup dan keberlanjutan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang memerlukan perhatian serius dalam perumusan kebijakan pembangunan. Tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan variasi yang cukup besar antar provinsi. Perbedaan struktur ekonomi, kualitas sumber daya manusia, serta kemampuan daerah dalam menyediakan lapangan kerja produktif menyebabkan tingkat kemiskinan tidak

tersebar secara merata. Dalam beberapa tahun terakhir, masih terdapat sejumlah provinsi yang secara konsisten mencatatkan tingkat kemiskinan relatif tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah yang menjadi tantangan dalam upaya penurunan kemiskinan secara nasional. Oleh karena itu, pemetaan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi menjadi penting sebagai dasar untuk memahami pola kemiskinan regional dan merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran (BPS Nasional, 2024).



Gambar 1.1 Sepuluh Provinsi dengan Tingkat Kemiskinan yang Tinggi di Indonesia tahun 2019 – 2023 (persen)

Sumber: BPS Nasional, 2024

Gambar 1.1 menunjukkan pada tahun 2019 – 2023 provinsi dengan tingkat kemiskinan paling tinggi salah satunya adalah Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur menunjukkan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dan bersifat persisten selama periode 2015–2023 serta secara konsisten berada di atas rata-rata nasional (BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2024). Selain itu, Provinsi Nusa

Tenggara Timur memiliki karakteristik pembangunan yang berbeda dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Meskipun terjadi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dari tahun ke tahun, tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Timur masih tergolong tinggi dan penurunannya relatif lambat (BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara peningkatan kualitas manusia dan perbaikan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selain itu, struktur perekonomian Nusa Tenggara Timur yang didominasi oleh sektor pertanian tradisional dan sektor informal menyebabkan peningkatan pendidikan formal belum sepenuhnya mampu meningkatkan pendapatan masyarakat (BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2024).

Keunikan Provinsi Nusa Tenggara Timur terletak pada struktur sosial dan ekonomi masyarakatnya. Perekonomian Nusa Tenggara Timur masih didominasi oleh sektor primer, khususnya pertanian tradisional, peternakan, dan perikanan skala kecil, yang memiliki produktivitas relatif rendah (BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2024). Sebagian besar penduduk bekerja di sektor informal dengan tingkat pendapatan yang tidak stabil dan rentan terhadap guncangan ekonomi maupun kondisi alam.

Dalam kondisi tersebut, peningkatan pendidikan formal belum tentu secara langsung meningkatkan pendapatan masyarakat, karena keterbatasan lapangan kerja produktif yang mampu menyerap tenaga kerja terdidik (BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2024). Hal ini menyebabkan hubungan antara pendidikan dan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur menjadi tidak selalu linear (BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2024).

Selain itu, karakteristik wilayah Nusa Tenggara Timur yang berupa kepulauan dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau turut menjadi faktor penghambat pembangunan manusia. Keterbatasan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, tingginya biaya akses layanan dasar, serta ketimpangan antar kabupaten/kota menyebabkan kualitas pembangunan manusia di Nusa Tenggara Timur berkembang secara tidak merata (BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2024). Kabupaten/kota tertentu, seperti wilayah perkotaan, cenderung memiliki capaian indeks pembangunan manusia yang lebih baik dibandingkan daerah kepulauan dan wilayah terpencil (BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2024). Ketimpangan ini memperkuat lingkaran kemiskinan, di mana rendahnya kualitas sumber daya manusia menyebabkan rendahnya produktivitas dan pendapatan, yang pada akhirnya kembali membatasi akses terhadap pendidikan dan kesehatan.

Berbeda dengan wilayah lain di Indonesia, seperti Pulau Jawa yang memiliki struktur ekonomi industri dan jasa yang relatif kuat, atau Papua yang memiliki karakteristik geografis ekstrem dan keterbatasan akses yang sangat tinggi, Nusa Tenggara Timur memiliki kombinasi permasalahan pembangunan manusia, kemiskinan struktural, dan ketergantungan pada sektor primer, kondisi kemiskinan di Nusa Tenggara Timur lebih representatif terhadap dinamika pembangunan wilayah Indonesia Timur yang umum (BPS Nasional, 2024). Dalam konteks penelitian ekonomi pembangunan daerah, pemilihan wilayah yang memiliki permasalahan representatif serta didukung oleh ketersediaan data yang memadai menjadi pertimbangan utama (Arsyad, 2010)

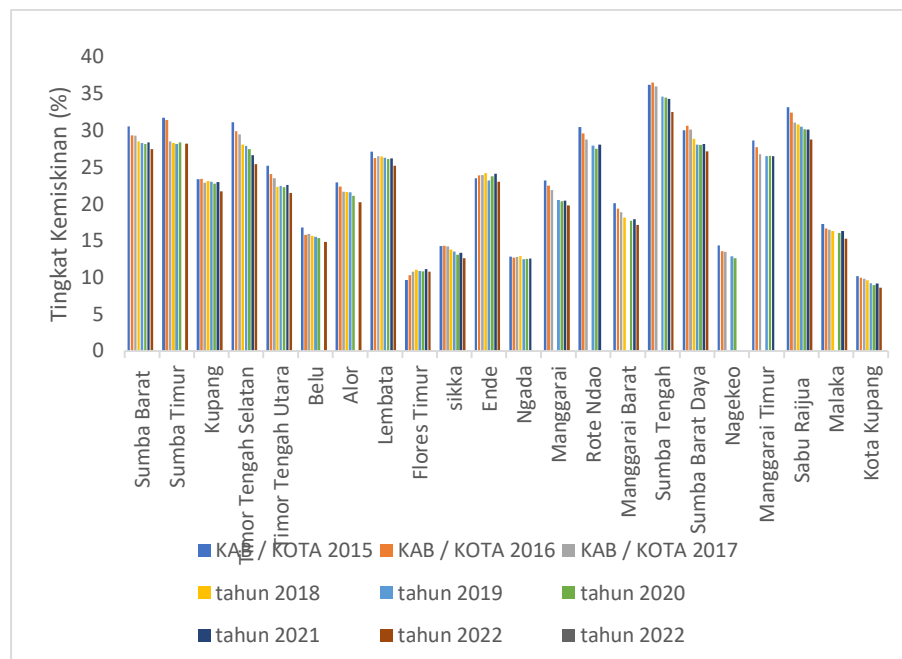
Pada tahun 2020, situasi semakin memburuk akibat pandemi Covid-19, yang menyebabkan lonjakan angka kemiskinan menjadi 10,19%. Provinsi-provinsi

di Indonesia Timur, terutama Nusa Tenggara Timur, mengalami dampak yang sangat besar, mengingat ketergantungan mereka pada sektor-sektor yang rentan terhadap guncangan ekonomi. Memasuki tahun 2021, meskipun angka kemiskinan mulai menunjukkan penurunan menjadi 9,75%, provinsi-provinsi dengan kemiskinan tertinggi tetap sama. Pada tahun 2022, angka kemiskinan nasional kembali menurun menjadi 9,57%, dan pada tahun 2023 tercatat 9,36%. Meskipun ada tren penurunan, provinsi Nusa Tenggara Timur masih menghadapi tantangan besar dalam mengurangi angka kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional (2024), tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Timur secara konsisten berada di atas rata-rata nasional selama periode 2015–2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di provinsi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Selain itu, Nusa Tenggara Timur memiliki karakteristik sosial ekonomi yang beragam di antara kabupaten/kota, baik dari segi indeks pembangunan manusia, tingkat pendidikan, pengangguran, maupun jumlah penduduk. Variasi ini menjadikan Nusa Tenggara Timur menarik untuk dikaji karena memungkinkan analisis yang lebih komprehensif mengenai pengaruh indikator-indikator pembangunan terhadap tingkat kemiskinan di wilayah dengan kondisi yang berbeda.

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang terus membaik (Badan Pusat Statistik, 2023). Namun, indeks pembangunan manusia di Nusa Tenggara Timur yang secara konsisten berada di bawah rata-rata nasional, serta terbatasnya kesempatan kerja formal yang menyebabkan tingginya kerentanan penduduk terhadap kemiskinan Pusat Statistik Provinsi Nusa

Nusa Tenggara Timur (2024), peningkatan indeks pembangunan manusia selama periode 2015–2023 belum sepenuhnya diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan secara konsisten. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perbaikan kualitas sumber daya manusia belum secara optimal terkonversi menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah dengan keterbatasan infrastruktur, kondisi geografis kepulauan, serta akses ekonomi yang belum merata seperti Nusa Tenggara Timur (Badan Pusat Statistik, 2023). Di sisi lain, tingkat pengangguran dan kualitas pendidikan di beberapa kabupaten/kota juga masih relatif rendah, yang dapat memengaruhi kemampuan masyarakat untuk keluar dari kemiskinan. Jumlah penduduk yang terus bertambah tanpa diimbangi dengan perluasan lapangan kerja turut memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat.



Gambar 1.2 Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2015 – 2023 (persen)

Sumber: BPS Nasional, 2024

Gambar 1.2 menunjukkan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi di kawasan timur Indonesia yang hingga kini masih menghadapi permasalahan kemiskinan yang relatif tinggi (BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2024). Provinsi ini terdiri dari wilayah kepulauan dengan jumlah pulau lebih dari 500 pulau, sehingga memiliki tantangan geografis yang cukup berat dalam pemerataan pembangunan, khususnya terkait keterbatasan infrastruktur dan tingginya kesenjangan antarwilayah (BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2024).

Kondisi geografis tersebut berdampak pada terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan dasar, aktivitas ekonomi, serta distribusi pembangunan yang belum merata. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024), pada tahun 2015 tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur tercatat sebesar 22,58 persen, dan meskipun mengalami penurunan, pada tahun 2022 angka kemiskinan masih berada pada level 20,48 persen (BPS Nasional, 2023). Penurunan tersebut menunjukkan bahwa laju pengurangan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur relatif lebih lambat dibandingkan dengan beberapa provinsi lain di Indonesia yang pada periode yang sama telah mampu menurunkan tingkat kemiskinan hingga di bawah 10 persen.

Pembangunan manusia menjadi faktor penting dalam menentukan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan keluar dari kondisi kemiskinan. Kualitas pembangunan manusia yang rendah umumnya ditandai oleh keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, rendahnya kualitas hidup, serta keterbatasan kapasitas produktif masyarakat. Oleh karena itu, indeks pembangunan manusia menjadi salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan. Dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan pembangunan di tingkat nasional dan

daerah, tetapi juga menjadi salah satu faktor penting untuk mengentaskan tingkat kemiskinan suatu wilayah (UNDP, 1990).

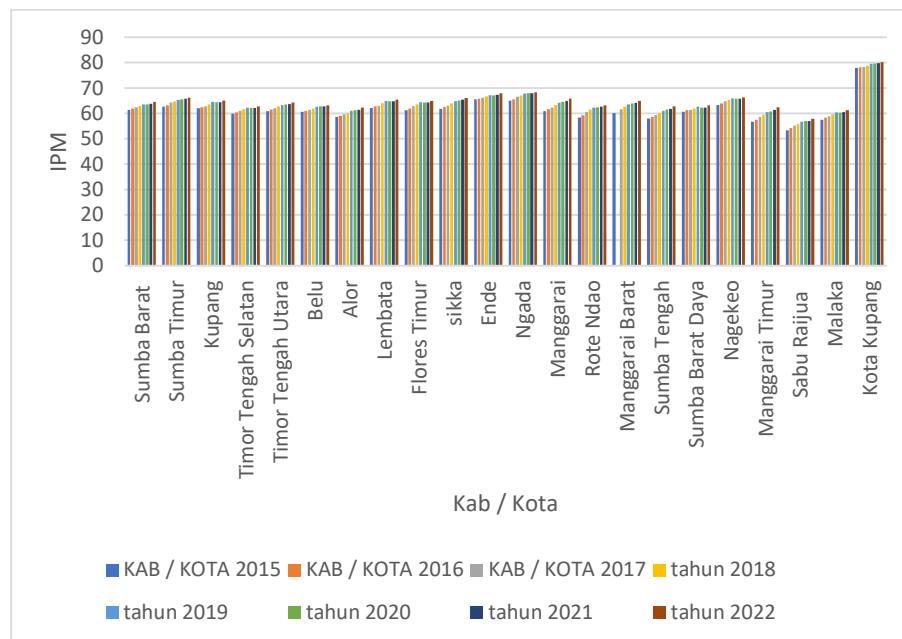
Berdasarkan teori pembangunan manusia (*human development theory*) yang diperkenalkan oleh (Sen, 1983), pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi dari perluasan pilihan dan kapabilitas manusia. Dalam kerangka ini, peningkatan indeks pembangunan Manusia diharapkan mampu menurunkan tingkat kemiskinan melalui perbaikan kualitas kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat (UNDP, 1990).

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, permasalahan kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari rendahnya kualitas sumber daya manusia, yang tercermin dari nilai IPM yang masih berada di bawah rata-rata nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah kemiskinan di Nusa Tenggara Timur bersifat struktural dan multidimensi, sehingga pengukurannya tidak cukup hanya menggunakan indikator ekonomi seperti pendapatan atau pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, indeks pembangunan manusia dipilih karena mampu menangkap berbagai aspek fundamental yang memengaruhi kemampuan masyarakat untuk keluar dari kemiskinan, seperti akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup layak (BPS Nasional, 2023).

Selain itu, indeks pembangunan manusia juga menjadi indikator utama yang digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan, sehingga penggunaan variabel ini relevan secara akademis maupun praktis. Dengan memasukkan indeks pembangunan manusia dalam model penelitian, diharapkan dapat diketahui sejauh mana peningkatan kualitas

pembangunan manusia berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Gambar 1.3 menunjukkan indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan dari 62,61 pada tahun 2015 menjadi 67,25 pada tahun 2022. Meskipun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia mencerminkan adanya kemajuan pada aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat, peningkatan tersebut belum cukup kuat untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan faktor pendukung lain, seperti rendahnya kualitas dan ketersediaan lapangan kerja produktif, dominasi sektor informal, serta rendahnya daya serap pasar tenaga kerja terhadap sumber daya manusia yang ada.



Gambar 1.3 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2015 – 2023

Sumber: BPS Nasional, 2024

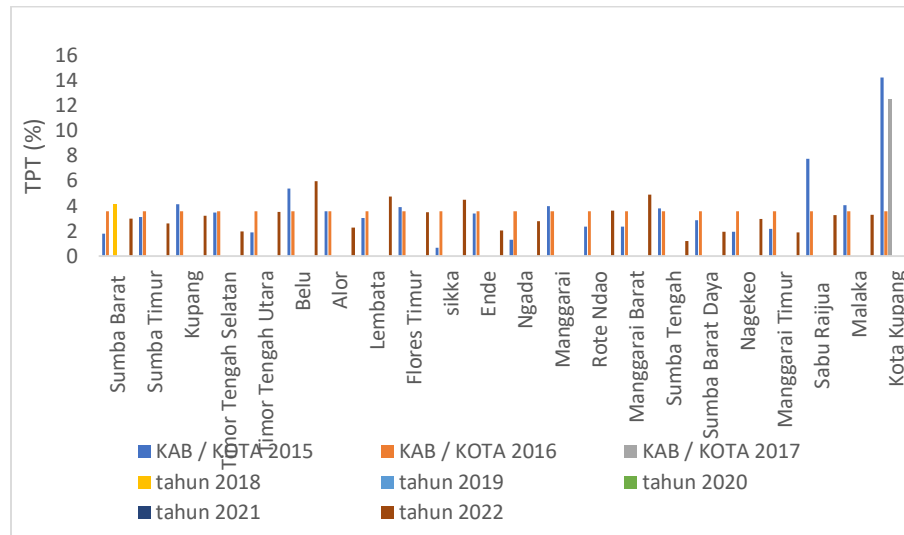
Menurut world bank (2018); Todaro & Smith, (2003), pengentasan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh peningkatan kualitas manusia, tetapi juga dipengaruhi oleh kesempatan kerja. Oleh karena itu, peningkatan indeks pembangunan manusia yang tidak diiringi dengan perbaikan struktur ekonomi dan penciptaan lapangan kerja formal dapat menimbulkan diskoneksi antara peningkatan kualitas manusia dan penurunan tingkat kemiskinan.

Selain itu, dimensi indeks pembangunan manusia seperti pendidikan seringkali diukur melalui kuantitas (misalnya harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), bukan kualitas. Di banyak daerah di Nusa Tenggara Timur, anak-anak mungkin bersekolah selama lebih dari 7 tahun, tetapi kualitas pembelajaran, keterampilan, dan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan pasar kerja masih rendah. Hal yang sama berlaku untuk dimensi kesehatan: angka harapan hidup mungkin meningkat karena penurunan kematian bayi dan peningkatan imunisasi, tetapi beban penyakit kronis dan akses terhadap layanan kesehatan yang bermutu masih menjadi masalah di banyak daerah.

Aspek standar hidup layak, meskipun pengeluaran per kapita meningkat, banyak rumah tangga di Nusa Tenggara Timur masih berada sedikit di atas garis kemiskinan, yang membuat mereka sangat rentan terhadap guncangan ekonomi, seperti inflasi pangan, bencana alam, dan pandemi. Situasi ini menunjukkan bahwa peningkatan indeks pembangunan manusia tidak secara otomatis berarti peningkatan kesejahteraan yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah peningkatan indeks pembangunan manusia benar-benar berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan, serta sejauh mana pengaruhnya dalam konteks sosial dan ekonomi yang khas di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan adalah tingkat pengangguran, yang memiliki hubungan langsung dengan kondisi kemiskinan karena ketiadaan pekerjaan membatasi kemampuan individu dalam memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar (Todaro & Smith, 2003). Tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kondisi pasar tenaga kerja. Tingginya tingkat pengangguran terbuka mencerminkan adanya permasalahan dalam penyerapan tenaga kerja di suatu daerah, yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan tingkat kemiskinan (Putra & Arka, 2016).

Gambar 1.4 menunjukkan setiap kabupaten dan kota yang ada di Nusa Tenggara Timur menghadapi tantangan dalam mengatasi tingkat pengangguran Menurut data dari BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur (2024), Perekonomian Nusa Tenggara Timur masih didominasi oleh sektor pertanian tradisional yang bersifat padat karya dan sangat bergantung pada musim. Karakteristik pekerjaan yang tidak berkelanjutan ini menyebabkan sebagian angkatan kerja mengalami pengangguran terbuka maupun setengah pengangguran, terutama pada periode di luar musim tanam dan panen. Selain itu, keterbatasan lapangan kerja formal yang mampu menyerap tenaga kerja secara berkelanjutan mencerminkan lemahnya kinerja pasar tenaga kerja di Nusa Tenggara Timur.



Gambar 1.4 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten / Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2015 – 2023 (persen)

Sumber: BPS Nasional, 2024

Kondisi tersebut tercermin dari tingkat pengangguran terbuka yang masih relatif tinggi dan menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingginya tingkat kemiskinan di daerah ini (Badan Pusat Statistik Nasional, 2023). Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap tingginya tingkat pengangguran terbuka di Nusa Tenggara Timur meliputi, rendahnya akses dan kualitas pendidikan mengakibatkan banyak individu yang tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk bersaing di pasar kerja. Menurut penelitian Wandal *et al.*, (2024) sekitar 30% lulusan SMA di Nusa Tenggara Timur tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yang mengurangi kemampuan mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Banyak pekerja muda Nusa Tenggara Timur yang pergi ke daerah lain untuk mencari peluang kerja yang lebih baik. Meskipun migrasi dapat meningkatkan kesejahteraan individu yang bermigrasi, fenomena ini juga berpotensi menimbulkan kekurangan tenaga kerja terampil di daerah asal seperti Nusa Tenggara Timur. Kondisi tersebut dapat memengaruhi struktur pasar tenaga

kerja daerah, yang pada akhirnya berimplikasi terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan, terutama apabila tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (Arsyad, 2010). Ketidakpastian ekonomi, terutama di sektor pertanian, yang dipengaruhi oleh cuaca, berkontribusi pada fluktuasi dalam penyerapan tenaga kerja.

Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi di Nusa Tenggara Timur memiliki beberapa dampak serius terhadap kondisi sosial dan ekonomi. Pekerja yang menganggur tidak memiliki sumber pendapatan yang stabil, menyebabkan mereka dan keluarga mereka kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Ini berkontribusi pada peningkatan angka kemiskinan di daerah ini (Ndamayilu *et al.*, 2024). Tingginya pengangguran dapat mengakibatkan masalah psikologis, seperti depresi dan stres. Ini juga dapat menyebabkan ketidakpuasan dalam hidup dan gangguan sosial. Pekerja yang menganggur sering kali tidak mampu membayar layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial, sehingga kualitas hidup mereka semakin menurun. Pengangguran dan kemiskinan sering kali saling terkait, di mana ketidakmampuan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak memengaruhi kemampuan individu untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak mereka, sehingga melanjutkan siklus kemiskinan.

Selain itu, pendidikan juga merupakan faktor yang sering dikaitkan dengan upaya pengentasan kemiskinan karena berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan peluang memperoleh pendapatan yang lebih baik (Todaro & Smith, 2003). Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Meskipun telah terdapat upaya peningkatan akses dan kualitas Pendidikan. Kondisi geografis yang tersebar, keterbatasan ekonomi rumah tangga, serta faktor sosial dan budaya menjadi

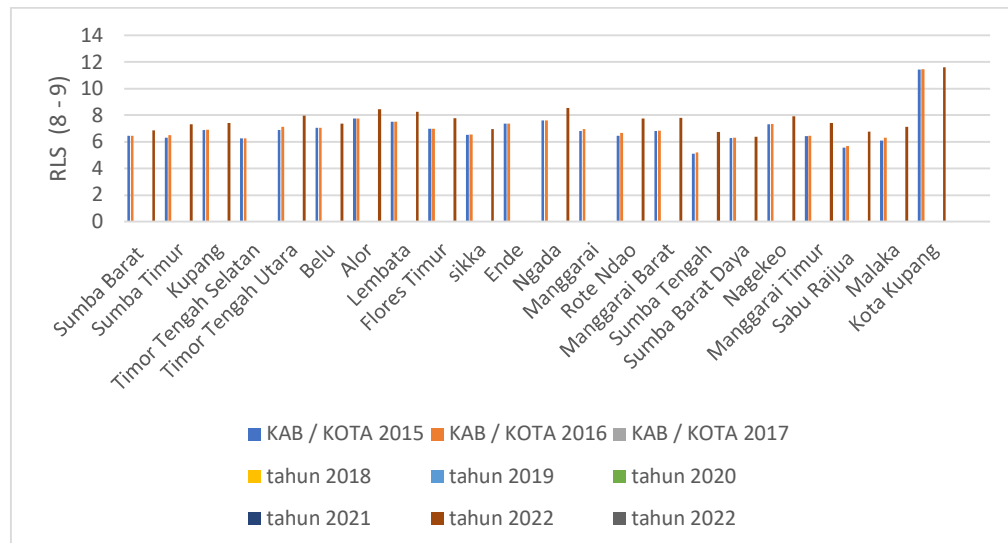
kendala dalam pemerataan dan keberlanjutan pendidikan di daerah ini (UNDP, 1990).

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, pendidikan masih menjadi salah satu tantangan utama pembangunan. Keterbatasan akses pendidikan di wilayah terpencil, serta tingginya angka putus sekolah menunjukkan bahwa kualitas pendidikan belum merata di seluruh kabupaten/kota. Kondisi ini berpotensi membatasi kemampuan penduduk usia produktif untuk bersaing di pasar kerja formal dan mendorong mereka tetap bekerja di sektor informal dengan pendapatan rendah, yang pada akhirnya berkaitan dengan tingginya tingkat kemiskinan (BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2023).

Selain itu, pendidikan juga dipilih sebagai variabel tersendiri meskipun telah menjadi bagian dari IPM, dengan tujuan untuk melihat pengaruh spesifik pendidikan secara langsung terhadap kemiskinan. Pemisahan variabel ini memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi apakah peningkatan pendidikan secara kuantitatif, yang diukur melalui rata-rata lama sekolah, benar-benar mampu menurunkan tingkat kemiskinan, atau justru pengaruhnya bergantung pada faktor lain seperti struktur lapangan kerja dan kondisi ekonomi daerah. Dengan demikian, pemilihan variabel pendidikan diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai peran pendidikan dalam pengentasan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur.

Gambar 1.5 menunjukkan perkembangan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 15 tahun ke atas di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode 2015–2023. Data dari BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur (2024) menunjukkan bahwa banyak anak tidak melanjutkan

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, terutama di daerah pedesaan. Amaluddin (2019) menyatakan angka putus sekolah di Nusa Tenggara Timur tergolong tinggi. Banyak anak dari keluarga miskin harus meninggalkan sekolah untuk membantu orang tua mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini berakibat pada rendahnya tingkat pendidikan yang diperoleh oleh generasi muda. Banyak sekolah di Nusa Tenggara Timur yang kekurangan fasilitas dasar, seperti ruang kelas, perpustakaan, dan akses internet.



Gambar 1.5 Rata - rata Lama Sekolah Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2015 – 2023 (tahun)

Sumber: BPS Nasional, 2024

Berdasarkan grafik tersebut, secara umum rata-rata lama sekolah di kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun selama periode pengamatan. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan capaian pendidikan formal penduduk, meskipun laju peningkatannya relatif bertahap. Kondisi tersebut mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan akses dan partisipasi pendidikan melalui

program wajib belajar, bantuan pendidikan, serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.

Namun demikian, pada grafik juga memperlihatkan adanya ketimpangan rata-rata lama sekolah antar kabupaten/kota. Kota Kupang secara konsisten memiliki nilai RLS tertinggi dibandingkan wilayah lainnya, yang mencerminkan kondisi wilayah perkotaan dengan akses pendidikan yang lebih baik, ketersediaan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap, serta peluang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2024). Sebaliknya, sebagian besar kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih menunjukkan nilai RLS yang relatif rendah, yang umumnya berkaitan dengan kondisi geografis, dominasi wilayah pedesaan, keterbatasan infrastruktur pendidikan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Meskipun Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan selama periode 2015–2023, capaian tersebut masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan rata-rata nasional (BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi Nusa Tenggara Timur belum menyelesaikan pendidikan menengah secara penuh. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kualitas sumber daya manusia dan kemampuan penduduk untuk memperoleh pekerjaan yang layak, sehingga memiliki keterkaitan dengan permasalahan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

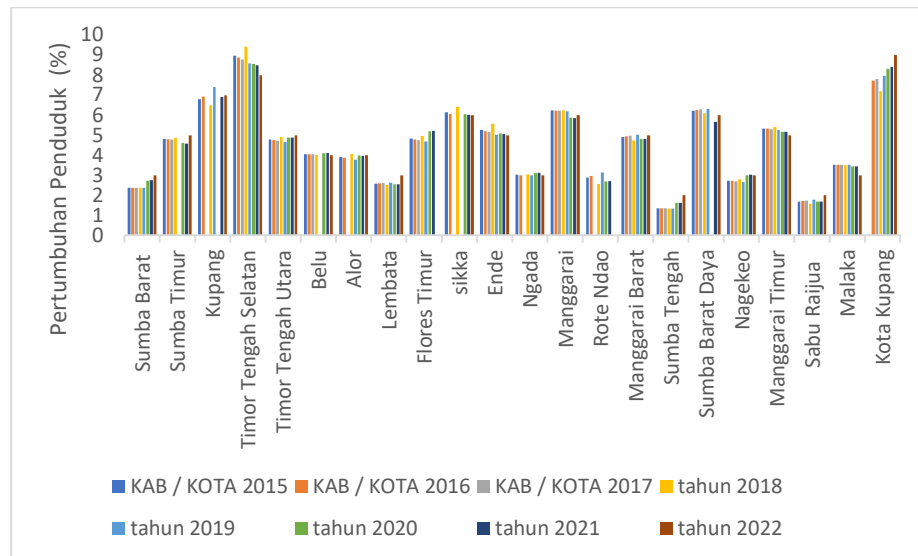
Sennuga *et al.* (2023) menyatakan lebih lanjut, pentingnya kualitas pendidikan, bukan hanya kuantitas, dalam mempengaruhi hasil ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Selain kualitas pembangunan manusia dan kondisi pasar tenaga kerja, dinamika jumlah penduduk juga merupakan faktor yang sering dikaitkan dengan permasalahan kemiskinan, karena pertumbuhan penduduk

dapat memengaruhi ketersediaan sumber daya, kesempatan kerja, serta tingkat pendapatan masyarakat (Todaro & Smith, 2003). Kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Oleh karena itu, jumlah penduduk sering dijadikan salah satu variabel penting dalam analisis kemiskinan, khususnya dalam konteks daerah berkembang yang masih menghadapi keterbatasan struktur ekonomi (Malthus, 1992).

Jumlah penduduk dan laju pertumbuhannya memiliki keterkaitan dengan kondisi ekonomi dan sosial suatu daerah. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menimbulkan tekanan terhadap ketersediaan lapangan kerja, pelayanan publik, dan sumber daya ekonomi, terutama apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas ekonomi daerah. Kondisi tersebut berpotensi memperbesar masalah pengangguran dan kemiskinan (Malthus, 1992). Jika pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja, kapasitas infrastruktur, serta layanan dasar yang memadai, maka hal ini dapat memperbesar tekanan terhadap sumber daya yang ada dan meningkatkan angka kemiskinan. Di Nusa Tenggara Timur, pertumbuhan penduduk relatif tinggi di beberapa kabupaten, namun tidak diikuti oleh pemerataan pembangunan (BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2024).

Wilayah dengan jumlah penduduk besar, seperti Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Selatan, masih memiliki angka kemiskinan yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk besar belum tentu menjadi kekuatan pembangunan jika tidak disertai dengan kualitas SDM dan kebijakan pembangunan yang inklusif. Selain itu, karakteristik wilayah Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari pulau-pulau juga menyulitkan distribusi pembangunan.

Pemerintah daerah sering kali mengalami kesulitan menjangkau seluruh populasi secara merata (BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2024).



Gambar 1.6 Persentase Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2015 – 2023 (persen)

Sumber: BPS Nasional, 2024

Gambar 1.6 menunjukkan Nusa Tenggara Timur memiliki pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan peningkatan kualitas hidup, akses pendidikan, lapangan kerja, serta pelayanan publik berpotensi besar memperparah masalah kemiskinan yang ada. Apabila pertumbuhan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja produktif, peningkatan kualitas pembangunan manusia, serta dukungan infrastruktur yang memadai, maka tekanan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat akan semakin besar dan berpotensi meningkatkan tingkat kemiskinan (Todaro & Smith, 2003).

Kondisi tersebut relevan dengan karakteristik Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki wilayah kepulauan dengan tingkat keterjangkauan infrastruktur, transportasi, dan layanan publik yang masih terbatas (BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2023). Keterbatasan ini memengaruhi efektivitas pembangunan manusia dan penyerapan tenaga kerja, sehingga sebagian besar penduduk masih bergantung pada sektor informal berproduktivitas rendah (World Bank, 2018). Akibatnya, peningkatan jumlah penduduk tidak secara langsung diikuti oleh peningkatan kesejahteraan, melainkan berkontribusi terhadap persistensi kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2023).

Selain itu, tingginya pertumbuhan penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas dan kesempatan kerja produktif, berpotensi memperbesar tekanan terhadap pasar tenaga kerja dan sumber daya ekonomi. Dalam teori Malthus, pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan kesempatan ekonomi akan menurunkan pendapatan per kapita dan meningkatkan risiko kemiskinan. Kondisi ini diperkuat oleh struktur perekonomian Nusa Tenggara Timur yang masih didominasi oleh sektor pertanian tradisional dan sektor informal dengan tingkat produktivitas yang rendah, sehingga penambahan jumlah penduduk tidak secara otomatis meningkatkan output dan pendapatan masyarakat.

Sejalan dengan teori tersebut, Todaro dan Smith (2003) menjelaskan bahwa di negara berkembang, pertumbuhan penduduk yang tinggi cenderung meningkatkan pengangguran dan setengah pengangguran apabila tidak diikuti oleh penciptaan lapangan kerja formal. Temuan ini juga didukung oleh penelitian Suryadarma *et al.* (2007) dan BPS Nasional (2023) yang menunjukkan bahwa

dominasi tenaga kerja berpendidikan rendah di sektor informal membatasi peningkatan produktivitas dan pendapatan, sehingga memperbesar kerentanan terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, jumlah penduduk dalam konteks Nusa Tenggara Timur lebih berperan sebagai faktor penekan terhadap kesejahteraan apabila tidak disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perluasan kesempatan kerja produktif.

Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Oktaviani & Qurrota A'yun (2021) dan Fayza *et al.* (2025) menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia dan pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, artinya peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh (Bahtiar & Hannase, 2021) yang meneliti beberapa provinsi di Indonesia bagian timur dan menemukan bahwa peningkatan indeks pembangunan manusia belum mampu menurunkan kemiskinan secara signifikan karena masih lemahnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan di wilayah tersebut.

Sementara itu, Sari (2021) menemukan bahwa pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan semakin tinggi tingkat pengangguran maka semakin tinggi tingkat kemiskinan. Namun, hasil berbeda diperoleh oleh Suharianto (2025) yang menemukan bahwa pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di beberapa daerah karena adanya fenomena *underemployment* (setengah menganggur) dan dominasi pekerjaan informal yang tidak tercatat secara resmi. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia , Pengangguran, Pendidikan dan Pertumbuhan Penduduk terhadap Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2015-2023”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka didapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Berapa besar pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Berapa besar pengaruh tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur?
3. Berapa besar pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur?
4. Berapa besar pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Untuk menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Untuk menganalisis pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

a) Manfaat Akademis

Hasil penelitian diharapkan mampu menambah wawasan serta perkembangan ilmu ekonomi terkait indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran, pendidikan dan pertumbuhan penduduk terhadap Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

b) Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dengan adanya kebijakan dalam beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.